



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 96-02-14-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **20:26** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh:

Perseorangan **NANDA NURKHALIS, S.Sos Partai Demokrat** untuk Provinsi **Aceh**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan terhitung 3 x 24 Jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Kamis** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **09:58** WIB.

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 96-02-14-01/AP3-DPR-
DPRD/Pan.MK/03/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : NANDA NURKHALIS, S.Sos
Kuasa Hukum :
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : 27 Maret 2024 pukul 20:26 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1 rangkap	File softcopy Permohonan yang dilampirkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
2	Permohonan (doc/docx)	1 rangkap	File softcopy Permohonan yang dilampirkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
3	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1 rangkap	File softcopy yang dilampirkan bukan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024
4	Surat Persetujuan Partai Politik	1 rangkap	File softcopy yang dilampirkan bukan Surat Persetujuan secara tertulis yang asli dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan

Jakarta, 28 Maret 2024
**Plt. Panitera,
Muhidin**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- **Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id**